

# Analisis Tata Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008-2013

**Moh. Benny Alexandri**

Dosen FISIP Universitas Padjadjaran – Bandung  
bennyalexandri@yahoo.co.id

## Abstrak

*The purpose of this study was to determine financial governance of Bangka Belitung Province Indonesia. The method used in this study was descriptive analysis. The sample used in this study were the Province Financial Statements year 2008-2013. The purpose of this study were (1) To Know condition of Kep. Bangka Belitung Province year. 2008 - 2013. (2) To Know the Projections 2013-2023 of Province Financial Condition (3) To Determine financial strategy of Kep Bangka Belitung Province.*

*The results of this study of Kep. Bangka Belitung is good enough which demonstrated by some indicators, such as the Regional Financial Independence Analysis was results less, Regions Financial Dependency Ratio was High result, Fiscal Decentralization ratio was enough results, ratio with the results of Highly Effective Effectiveness and Efficiency Ratio was Inefficient. Financial Projections Kep Bangka Belitung shows the condition of PAD is more stable and tends to increase with the proportion of about 10 % of APBD. Financial governance strategy can be described by quadrant II in Regional Capability Index which illustrates that Kep. Bangka Belitung Province were good, and has the potential for increasing revenue.*

**Kata Kunci :** *Financial Governance, Financial Projection.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Semenjak berjalannya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, kemajuan meliputi hampir semua bidang. Kemajuan melingkupi tidak saja bidang swasta, namun turut mempengaruhi bidang pemerintahan. Sebelum adanya reformasi, pemerintah dikendalikan terpusat di Jakarta sebagai ibukota negara. Daerah diberikan porsi yang dibatasi sehingga terjadi ketimpangan yang membuat pembangunan tidak merata. Ironi yang terjadi adalah daerah kaya yang memperoleh pengembalian kekayaan yang tidak sebanding. Perlahan hal ini seperti duri dalam daging, yang mendorong masyarakat resisten dan daerah menuntut keadilan.

Semenjak di sahkannya desentralisasi daerah, harapan ketimpangan itu mulai

berkurang. Desentralisasi adalah kebijakan yang dianggap dapat menjadi jalan pintas bagi daerah untuk bergerak dengan leluasa dalam mensejahterakan rakyatnya. Desentralisasi terbukti dapat membuat pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Desentralisasi dapat membuat terjadinya peningkatan mobilisasi dana dan perbaikan dari aspek infrastruktur hingga sumberdaya manusia.

Dengan adanya desentralisasi akan membawa kepada otonomi daerah. Imbasnya adalah adanya kemandirian daerah dalam mengelola uangnya. Harapannya adalah adanya keseimbangan antara kemampuan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD). Misalnya daerah Provinsi Kalimantan Timur yang notabene adalah daerah kaya dengan hasil berupa minyak bumi, seharusnya tidak

memiliki masalah dengan keuangan daerahnya.

Lantas bagaimanakah dengan daerah lain yang memiliki kekayaan daerah yang minim? Sudah seharusnya terjadi pemerataan berupa bantuan dari pemerintah pusat agar tidak terlalu tinggi perbedaan antara masing-masing daerah.

Bagaimanakah kondisi keuangan daerah yang ada kini? Apakah dengan adanya otonomi hal ini tidak menjadi masalah?

Hasil analisis APBD dari Kementerian Keuangan, Paling tidak terdapat 20 kabupaten/kota yang mengalami kejadian ini. Hal ini menunjukkan tidak sehatnya APBD mereka, karena dengan demikian belanja menjadi tidak jelas sumber pendanaannya. Sebaliknya, kondisi yang berlawanan juga terjadi dimana terdapat beberapa daerah yang menganggarkan surplus penerimaan (yang berarti terjadi selisih positif antara defisit/surplus dengan netto pembiayaan).

Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut memang mentargetkan SiLPA mereka. Terlepas dari apapun tujuan target SiLPA, namun hal ini tidak layak dilakukan dalam pola pengelolaan keuangan yang sehat, karena akan menimbulkan tidak efisiennya penggunaan budget untuk membiayai peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong munculnya dana yang off budget.

Halim (2001:125) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Sesuai laporan Kementerian Keuangan tahun 2013, Secara agregat provinsi, kabupaten dan kota, rata-rata rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah 42,78%. Rasio ini lebih rendah dari tahun anggaran sebelumnya yang mencapai rata-

rata 44,7%. Penurunan rasio belanja pegawai secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, meskipun penurunannya relatif kecil namun menunjukkan upaya rasionalisasi terhadap struktur belanja daerah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota Pangkal Pinang, menjadi provinsi Indonesia ke-29 pada tanggal 4 Desember 2000 adalah satu daerah yang merupakan hasil pemekaran daerah. Dengan adanya pemekaran, hal timbul adalah kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Aset daerah masih tercampur dengan aset provinsi lama. Hal inilah yang menyebabkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dalam posisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2013.

Darimanakah sebenarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kep. Bangka Belitung? Struktur ekonomi di provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel) dalam beberapa tahun terakhir masih bertumpu pada empat sektor, yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pertanian, serta perdagangan, hotel, dan restoran. Peranan keempat sektor itu secara total melebihi 75% dari PDRB Bangka Belitung yang terbentuk.

Namun dengan adanya peranan sektor tersebut, ternyata mempengaruhi kinerja PDRB daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung saat ini. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimanakah sebenarnya tata kelola keuangan Provinsi Kep. Bangka Belitung? Melihat sudah mulai menurunnya trend pertambangan dan meningkatnya minat wisatawan ke daerah. Darimanakah sebenarnya PAD terbesar Provinsi Kep. Bangka Belitung? Apakah APBD Provinsi masih didominasi oleh pembayaran belanja pegawai?

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sebagai Provinsi yang baru berpisah dari Provinsi induknya, Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki tata kelola keuangan yang masih terus berkembang. Dengan memperoleh predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK tahun 2013, maka sektor apakah sebenarnya yang perlu dikembangkan oleh Provinsi Kep. Bangka

Belitung. Untuk itulah maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Bagaimana Tata Kelola Keuangan Daerah yaitu dari Kemampuan Kemandirian Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung 2008-2013
- b) Bagaimana Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung 10 tahun yang akan datang 2013-2023
- c) Bagaimana Strategi yang dapat dilakukan oleh Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Tata Kelola Keuangan Daerah

Menurut Laporan analisis dari Kementerian Keuangan pada tahun 2013, Data APBD menunjukkan bahwa adanya kecenderungan daerah untuk menganggarkan defisit dalam APBD-nya. Hal ini terlihat dari 491 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia pada Tahun Anggaran (TA) 2013 sebanyak 457 daerah menganggarkan defisit dalam APBD-nya, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 447 daerah yang menganggarkan defisit. Kecenderungan daerah menganggarkan defisit tersebut karena adanya SiLPA dalam APBD mereka, artinya sebenarnya secara umum daerah tidak sedang dalam kondisi defisit secara riil, tetapi mereka menganggarkan defisit karena untuk menyerap SiLPA tahun sebelumnya. Hal lain yang juga menarik untuk dicermati adalah bahwa pada umumnya daerah terbukti mengalami surplus pada saat realisasi.

Masih menurut Kementerian Keuangan (2013) Terdapat 5 provinsi yang memiliki rasio Belanja Pegawai lebih dari 50 %, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian, karena secara implisit provinsi-provinsi tersebut hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain Belanja Peggawainya. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program

dan kegiatan daerah di luar Belanja Pegawai yang bisa didanai, khususnya dalam mendukung pemenuhan layanan publik.

Halim (2001:127) memiliki beberapa formula untuk menghitung kinerja keuangan daerah yang sudah digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Formula tersebut adalah :

- a. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. Formula ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya yang diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya. Formulasnya adalah :
- b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Menurut Halim (2001) Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).
- c. Rasio Desentralisasi Fiskal. Menurut Halim (2001) Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal.
- d. Rasio Efektifitas. Menurut Halim (2001) Pengukuran tingkat efektifitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan.
- e. Rasio Efisiensi. Menurut Halim (2001) Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan

**Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah**

Apakah manfaatnya memproyeksi keuangan daerah. Salah satunya adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan dari sisi makro maupun mikro. Untuk itulah maka dipilihnya metode paling tepat dari proyeksi adalah keharusan agar proyeksi tidak meleset dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu penelitian ini mencoba menggunakan proyeksi dengan metode yang berbeda, dengan dasar pemilihan risiko penyimpangannya paling kecil. Untuk itu digunakan MAPE (Mean Absolute Percentage Error), MAD (Mean Absolute Deviation), atau MSD (Mean Square Deviation).

Semakin kecil nilai-nilai MAPE, MAD, atau MSD, semakin kecil nilai kesalahannya. Oleh karenanya, dalam menetapkan model yang akan digunakan dalam peramalan, pilihlah model dengan nilai MAPE, MAD atau MSD yang paling kecil.

**Strategi Keuangan Daerah**

Setelah mengetahui posisi keuangan daerah maka, strategi yang digunakan adalah dengan dasar dari Indeks Kemampuan Daerahnya. Menurut Halim (2001) Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan kemudian mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (growth), Indeks Elastisitas dan Indeks Share. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen.

**METODOLOGI**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan kajian data sekunder yaitu berupa laporan keuangan Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2003 sampai dengan 2013. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data primer berupa wawancara dengan pihak terkait dengan keuangan di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Lokasi Penelitian dilakukan di kantor pemerintahan Kep. Bangka Belitung, yaitu :

- a. Dinas Penerimaan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung
- b. Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung
- c. Kantor Sekretaris Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Studi Literatur
- 2. Interview
- 3. Focus Group Discussion

**HASIL PENELITIAN**

**Analisis Tata Kelola Keuangan Daerah**

Berikut adalah gambaran perkembangan APBD untuk 5 (lima) tahun anggaran. Struktur APBD tahun 2008-2013 telah di komparasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pada tabel berikut ini:

Tabel 1.  
Peningkatan PAD

TA	APBD	Pendapatan Asli Daerah	%
2003	275,323,315,617	71,789,118,253	26.0745
2004	324,412,640,492	114,368,223,031	35.2539
2005	435,167,347,128	188,167,354,665	43.2402
2006	546,961,448,176	198,173,311,840	36.2317
2007	609,867,856,708	203,541,902,473	33.3748
2008	971,399,105,648	234,940,406,932	24.1858
2009	1,128,200,361,942	255,269,242,162	22.6262
2010	1,044,353,996,356	297,221,240,328	28.4598
2011	1,319,129,357,087	364,496,034,466	27.6316
2012	1,619,791,080,526	423,107,063,159	26.1211
2013	1,837,133,947,552	433,307,517,261	23.5861
RATA-RATA			29.7078

Sumber : Hasil observasi

Komposisi PAD terhadap APBD adalah sekitar 29%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan PAD daerah Provinsi berada dikisaran 20% hingga 30%.Komposisi besarnya Belanja Daerah masih lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatannya. Besarnya Belanja ini ditutupi dengan adanya Dana Perimbangan dari Pusat. Hal ini terbilang wajar bagi keuangan daerah. Besarnya PAD untuk Provinsi didominasi dari Retribusi dan Pajak dan hasil pengelolaan kekayaan alam. PAD merupakan tolak ukur

dari daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di era otonomi daerah ini. Semakin besar PAD menunjukkan adanya kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2008-2013 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan.

### Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rasio yang besarnya berada di 40% ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian Provinsi masih kurang. Dana perimbangan yang besar dibandingkan pendapatan asli daerah mengindikasikan bahwa Provinsi harus lebih meningkatkan nilai PAD-nya.

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD-nya dibandingkan penerimaan lain APBD tanpa subsidi adalah tinggi.

### Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan adalah cukup yaitu dikisaran 30%.

### Rasio Efektifitas

Efektifitas ini menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan anggarannya. Hal ini tidak menggambarkan kemampuan untuk memperoleh keuangan daerah namun dalam merealisasikan anggarannya. Dalam keuangan daerah, bila mampu untuk merealisasikan anggarannya maka daerah dianggap efektif dan berprestasi. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk kategori sangat efektif.

### Rasio Efisiensi

Seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan

membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Sehingga provinsi dalam hal ini memiliki rasio Efisiensi yang tidak efisien karena total pengeluarannya yang lebih besar dibandingkan total penerimaannya.

Tabel 2.  
Hasil Perhitungan

No	Rasio	Nilai
1	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah	Kurang
2	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Tinggi
3	Rasio Desentralisasi Fiskal	Cukup
4	Rasio Efektifitas	Sangat Efektif
5	Rasio Efisiensi	Tidak Efisien

### Proyeksi Keuangan Daerah

Besarnya APBD 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

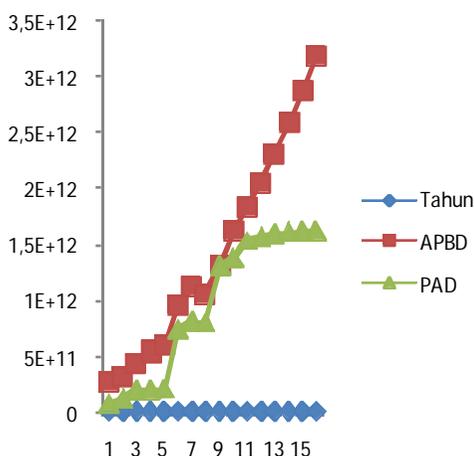
Tabel 3.  
Pertumbuhan APBD

Tahun Anggaran	APBD	Pertumbuhan
2003	275,323,315,617	
2004	324,412,640,492	17.83
2005	435,167,347,128	34.14
2006	546,961,448,176	25.69
2007	609,867,856,708	11.50
2008	971,399,105,648	59.28
2009	1,128,200,361,942	16.14
2010	1,044,353,996,356	-7.43
2011	1,319,129,357,087	26.31
2012	1,619,791,080,526	22.79
2013	1,837,133,947,552	13.42
2014	2,044,970,000,000	11.31
2015	2,325,000,000,000	13.69
2016	2,624,990,000,000	12.90
2017	2,944,950,000,000	12.19
2018	3,284,880,000,000	11.54
2019	3,644,780,000,000	10.96
2020	4,024,640,000,000	10.42
2021	4,424,470,000,000	9.93
2022	4,844,260,000,000	9.49
2023	5,284,030,000,000	9.08

Secara rata-rata pertumbuhan APBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, ada di kisaran 10%. Hal ini cukup baik, mengingat semakin berkembangnya kondisi keuangan daerah, bukan saja bagi Provinsi Kep. Bangka Belitung saja, namun juga provinsi lain. Menurut Laporan Kementerian Keuangan tahun 2013,

pertumbuhan tertinggi masih dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertumbuhan dari APBD tidak menggambarkan kinerja dari provinsi. Harus dilihat pula perkembangan PAD-nya. Perkembangan PAD dapat dilihat seperti gambar berikut ini:

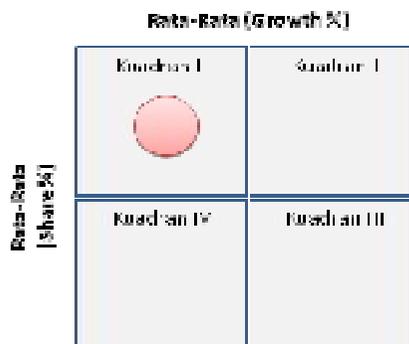


Gambar 1.  
Proyeksi APBD dan PAD (2014-2018)

Tampak dari gambar di atas, bahwa APBD bergerak naik dan PAD bergerak cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki kecenderungan menaik. Hal ini tentu dapat menjadi warning bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan peluang mendapatkan PAD-nya.

**Analisis Strategi Keuangan Daerah**

Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran. Bila keseluruhan data keuangan di atas dirangkum, maka dapat digambarkan bahwa kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada di Kuadran II sebagai berikut :



Gambar 2.  
Kuadran Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Dari Peta di atas, tampak bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di kuadran II yang artinya Provinsi memiliki kemampuan meningkatkan PAD-nya. Beberapa cara dalam meningkatkan PADnya dapat digambarkan seperti telah di bahas sebelumnya.

Strategi apakah yang dapat dilakukan oleh Provinsi Kep. Bangka Belitung. Beberapa hal ini dapat dilakukan:

1. Dilakukannya kegiatan yang secara administrasi mendukung bertumbuhnya PAD daerah. Melakukan pengembangan penerimaan daerah dari sumber yang sebelumnya, misalnya pendataan pariwisata dan kebudayaan, optimalisasi aset daerah dan peningkatan dana perimbangan dengan menggunakan metode tepat dalam merealisasikan anggaran setiap tahunnya agar dana dapat terserap
2. Fokuskan penggunaan dana untuk mendukung kebijakan dan prioritas yang paling strategis. Pilih program yang memberikan nilai tambah paling besar.
3. Kembangkan sektor unggulan baru seperti pariwisata, kesehatan atau pendidikan agar provinsi tidak terpaku kepada sumber tradisional saja.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keadaan keuangan Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah cukup baik dengan ditunjukka oleh beberapa indicator, diantaranya adalah Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dengan hasil Kurang, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dengan hasil Tinggi, Rasio Desentralisasi Fiskal dengan hasil Cukup, Rasio Efektifitas dengan hasil Sangat Efektif dan Rasio Efisiensi dengan hasil Tidak Efisien
2. Proyeksi Keuangan Provinsi Kep. Bangka Belitung menunjukkan kondisi PAD yang semakin stabil dancenderung meningkat dengan proporsi sekitar 10% dari total APBD-nya.
3. Strategi Tata kelola keuangan Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat digambarkan dengan kuadran II dalam Indeks Kemampuan Daerah yang menggambarkan bahwa Provinsi Kep. Bangka Belitung berada dalam kisaran masih sehat dan memiliki potensi PAD yang terus meningkat.

### Saran

Dengan diterimanya opini Wajar dengan Pengecualian Provinsi Kep. Bangka Belitung, maka sudah saatnya pemerintah menerapkan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (LKBA). Hal ini sesuai dengan anjuran BPK sehingga opini yang diberikan BPK atas LKPD tahun 2015 tak mengalami penurunan hanya karena Pemda belum menerapkan LKBA

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
- BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- ..... 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul., 2001, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- I Dewa Gde Bisma \* Dan Hery Susanto, 2010, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007
- Laporan Analisis Kinerja Keuangan Daerah 2013, Kementerian Keuangan RI
- Rosjidi., 2001, *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Standar dan Metode*, Aksara Satu, Jakarta.